

Pengaruh Konflik Rohingya Myanmar terhadap Stabilitas Keamanan Asia Tenggara

Sri Lusi Rahmawati Surun

Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Makassar

Email: srilusirahmawatisurun@gmail.com

Abstract: *The issue of this conflict for security stability is the Myanmar refugees throwing responsibilities in looking to other countries for possible immigration of the rohingya ethnic immigrants. The purpose of this study is to analyze and discuss the human problem regarding the impact Myanmar Rohingya conflict on southeast Asia's security stability. The study employs qualitative descriptive methods that analyze and describe a problem. Research has shown that countries are ASEAN the policy is that decisions taken in the face of myanmar's rohinge conflict cling to communities that refer to rules with equal values and norms. Cohesive, peaceful and resilient regions with the collective responsibility to create comprehensive security, and dynamic, outgoing regions. All of ASEAN member states provide full aid to the completion of the Rohingya conflict, with no difference between Sara and international diplomacy. It is not wrong that ASEAN, as a regional organization, is expected to be able to resolve the crisis in achieving security stability because to reach a stable country requires a stable region.*

Keywords: *Conflict, Security, Rohingya*

Abstrak : *Permasalahan dari konflik ini dalam hal stabilitas keamanan adalah pengungsi Myanmar melempar tanggungjawab dengan mengharapkan kepada negara-negara lain untuk dapat bisa menerima imigran imigran etnis Rohingya. Tujuan dari penelitan ini adalah untuk menganalisis dan membahas permasalahan kemanusiaan terkait Pengaruh Konflik Rohingya Myanmar terhadap Stabilitas Keamanan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat menganalisa dan mendeskripsikan suatu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara-negara ASEAN membuat kebijakan bahwa keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik Rohingnya Myanmar berpegang teguh pada Masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma, Kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif, dan Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar. Semua negara anggota ASEAN memberikan bantuan penuh kepada penyelesaian konflik Rohingya tanpa membedakan SARA dengan melakukan diplomasi-diplomasi internasional. Tidak salah jika ASEAN sebagai organisasi regional diharapkan mampu untuk menyelesaikan krisis tersebut dalam pencapaian stabilitas keamanan karena untuk mencapai suatu negara yang stabil diperlukan suatu kawasan yang stabil.*

Kata Kunci: *Konflik, Keamanan, dan Rohingya*

1. Pendahuluan

Negara Myanmar memiliki letak yang dikelilingi oleh lima Negara-negara dengan perkembangan dan peradaban yang sangat besar. Neraga-negara tersebut diantaranya Cina dan India, dan tiga negara disekelilingnya Bangladesh, Thailand, Laos juga Laut Andaman di sebelah selatan. Negara Myanmar tergabung menjadi anggota kawasan negara-negara Asia Tenggara yaitu ASEAN (Asosiation Southeast Asian Nations) bergabung pada tanggal, 23 Juli 1997 (Karina 2020).

Myanmar 80% masyarakatnya beragama Buddha. Meskipun mayoritas beragama Buddha, pemerintah Myanmar masih mengizinkan masyarakat memiliki kepercayaan lain. Myanmar memiliki Ibu kota negara di Naypyidaw yang sebelumnya berada di kota Yangon yang dipindahkan pada saat itu pemerintahan dalam penguasaan junta militer pada tanggal, 7 November 2005 kota yang disebut memiliki arti "tempat kediaman raja" tersebut dipilih menjadi tempat ibu kota negara saat ini. Kepemimpinan terakhir rezim militer dikepalai oleh U Thein Sein salah seorang pensiunan petinggi dari Militer Myanmar namun, setelah desakan berkali-kali oleh masyarakat yang menginginkan negara demokratis, terpilihlah partai demokrasi yang dimenangkan oleh partai National Democracy Liga (NDL) yaitu partai yang diusung oleh Aung Shan Suu Kyi yang menunjuk calonnya sebagai presiden bernama U Htin Kyaw yang merupakan orang lama kepercayaannya (Faurika 2020).

Negara yang sedang berkembang dan berupaya melakukan perubahan politik dan perekonomiannya menuju arah pemerintahan yang demokratisasi, namun masih menemui kendala dalam menyelesaikan konflik etnis, organisasi internasional masalah HAM menyebutkan pemerintahan Myanmar/Burma sepertinya gagal dalam upaya memenuhi harapan untuk melaksanakan reformasi. Lamanya kekuasaan oleh otoritas militer hingga saat ini masih menjadi hambatan dalam menghadapi permasalahan perekonomian dan hak asasi manusia.

Permasalahan anggaran negarapun tentunya menjadi kendala, karena pengeluaran yang tidak sebanding dengan pemasukan. Biaya negara menjadi lebih kepada pembenahan infrastruktur yang telah hancur dilanda konflik. Pindahan ibu kota negara yang dilakukanpun membutuhkan pembangunan dan dukungan infrastruktur agar jalan pemerintahan berjalan baik. Begitupula perbaikan fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan dan konflik etnis sepanjang kemerdekaan hingga kini, menjadi faktor pemborosan terhadap anggaran negara untuk menuju politik demokratis yang lebih baik. Pemerintah yang selalu mengambil sikap protektif terhadap publik, seperti persoalan hak kepemilikan lahan, bidang kesehatan, kualitas pendidikan, dan pekerjaan yang tidak berimbang, semua lebih kepada menguntungkan para penguasa atau pemerintah, ketidakadilan dan tidak meratanya aturan pemerintah yang ada, menjadikan masyarakat khususnya etnis minoritas seperti rohingya menjadi terbelenggu oleh berbagai aturan-aturan pemerintah yang tidak berpihak terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, malah membuat rakyat bertambah termarginalkan.

Diskriminasi terhadap etnis hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan sejak dari awal pemerintahan memproklamkan kemerdekaan Januari 1948. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris semua sistem pemerintahan Myanmar yang memungkinkan tumbuh, berkembang adalah mereka yang selama ini didominasi oleh etnis Burma. Dengan aturan-aturan yang tidak berpihak terhadap rakyat minoritas juga seperti halnya diskriminasinya terhadap etnis rohingya, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan myanmar akan berakibat kepada permasalahan kecil dapat dengan cepat menjadikan permasalahan bertambah besar seperti munculnya kekerasan yang sekarang terjadi di wilayah Rakhine yaitu kasus yang di duga berawal dari terjadinya tindakan pemerkosaan terhadap seorang wanita Buddha pada tanggal, 29 Mei 2012 oleh beberapa pemuda dari etnis Rohingya yang menjadikan aksi balas-membalas dari dua suku di wilayah rakhine berkembang menjadi konflik kesukuan dan agama. Hingga menimbulkan kerusakan materil dan inmateril yang sangat besar terhadap infrastruktur Negara (Sawal 2017).

Konflik etnis yang muncul dan berkembang hingga saat ini pada dasarnya akibat berawal dari kekecewaan masyarakat atas kebijakan yang dibuat pemerintah terutama ketimpangan yang menyangkut agama, etnisitas dan kemiskinan yang terjadi terus berlanjut di dalam negara, sehingga muncul gerakan perlawanan etnis yang menuntut menginginkan perubahan politik untuk mendapatkan perhatian dan otonomi dari pemerintah pusat. Lambatnya respon pemerintah dalam mengontrol perekonomian dan stabilitas keamanan politik dalam negeri memicu konflik bertambah besar. Keragaman budaya, antar etnis dan agama yang merupakan masalah pelik yang dapat dengan mudah menyulut konflik terbuka bahkan bisa mencapai kekerasan yang tinggi dan menelan banyak korban jiwa.

Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, dilakukan etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya muslim seakan dibiarkan pemerintah dan terlihat membela etnis Mayoritas. Dan permasalahan pengungsi Myanmar melempar tanggungjawab dengan mengharapkan kepada negara-negara lain untuk dapat bisa menerima imigran etnis Rohingya ini yang sering disebut-sebut masyarakat imigran dari Bengali - Bangladesh. Pemerintahan Myanmar yang ikut serta dan memfasilitasi tindakan anarkis etnis Rakhine dan buddhies radikal terhadap etnis rohingya (muslim) ini juga memicu respon negara-negara muslim di Asia seperti Thailand, Malaysia, Indonesia.

Kekerasan di wilayah Rakhine ini merupakan kekerasan terburuk yang pernah terjadi, hingga negara-negara kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN mengadakan pertemuan di Naypyidaw pada 6 Desember 2016 dengan para menteri luar negeri untuk membahas kekacauan yang terjadi di wilayah Rakhine ini. Dalam pertemuan kali ini Indonesia mendorong agar penghormatan dan perlindungan terhadap HAM bagi semua masyarakat di negara bagian Rakhine, termasuk minoritas muslim, untuk terus ditegakkan.

Kawasan Asia Tenggara ini sepanjang sejarahnya rentan terhadap pengaruh-pengaruh negara barat untuk dapat dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan dari pengaruh ideologi yang mereka tanam yang pada akhirnya dinikmati oleh kalangan mereka sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membahas permasalahan kemanusiaan terkait Pengaruh Konflik Rohingya Myanmar terhadap Stabilitas Keamanan Asia Tenggara.

2. Kajian Teori

2.1. Konflik

Konflik (conflict) secara etimologi, berasal dari kata kerja bahasa Latin, *Configere* yang berarti saling memukul. Perkembangan sosiologi mengantarkan konflik pada arti sebagai interaksi sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) yang salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuat tidak berdaya. Dengan kata lain, konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu ataupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.

Menurut (Arya Ardani 2015) Ada berbagai jenis dan macam konflik, yaitu sebagai berikut:

- a. Konflik Gender Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dilihat pada aspek lahiriah, tetapi lebih berorientasi pada aspek sosiokultural. Pada struktur masyarakat tradisional, istilah gender tidak memunculkan persoalan, tetapi pada masyarakat modern, istilah gender menjadi permasalahan yang cukup penting, terutama isu-isu emansipasi yang diluncurkan kaum wanita.
- b. Konflik rasial dan antar suku Konflik ini lebih mengedepankan aspek rasial (ras) di antara sebagian kelompok manusia dan konflik antar suku di suatu tempat atau daerah.
- c. Konflik antar agama Agama dipandang sebagai perekat ikatan sosial, tetapi juga menjadi disintegrasi sosial. Konflik antar agama disebabkan perbedaan keyakinan agama, munculnya agama baru, aliran sesat, pendiri rumah ibadah, dan lainnya.
- d. Konflik antar-golongan Demokratisasi tidak hanya berdampak positif, tetapi juga mengantarkan berbagai konflik antar-golongan. Masyarakat secara tidak langsung terdiferensiasi dalam golongan yang sangat rawan dengan pergolakan sosial. Pemicunya adalah satu golongan memaksakan kehendaknya kepada golongan lainnya.
- e. Konflik kepentingan Konflik ini identik dengan konflik politik. Artinya, realitas politik selalu diwarnai oleh dua kelompok yang mempunyai kepentingan masing-masing sehingga berbenturan.
- f. Konflik antar pribadi, disebut juga konflik antar individu, dipicu adanya perbedaan kepentingan dan ketidakcocokan antar individu.
- g. Konflik antar kelas sosial, Konflik ini berupa konflik yang bersifat vertikal, yaitu konflik antar kelas sosial atas dan kelas sosial bawah. Konflik ini dipicu oleh perbedaan kepentingan yang berbeda.
- h. Konflik antar negara. Konflik yang terjadi antar dua negara atau lebih dipicu oleh perbedaan tujuan negara dan upaya pemaksaan kehendak suatu negara kepada negara lainnya.

2.2. Konflik Keagamaan Myanmar

Klaim bahwa agama ikut andil dalam memicu konflik dan menjadi sumber konflik antar umat beragama sulit dibantah. Pada kenyataannya konflik antar umat beragama merupakan fenomena yang tidak pernah padam, tidak pernah berhenti, dan hampir merupakan bagian intern dari pluralitas agama itu sendiri. Konflik keagamaan bisa diartikan sebagai pertikaian antar agama, baik antar sesama penganut agama itu sendiri maupun antara satu agama dengan agama yang lain. Hal ini dikarenakan definisi konflik keagamaan tidak hanya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, politik, dan kekuasaan. Banyak tindakan kekerasan dalam konflik keagamaan banyak bersumber dari sifat ekspresif atau simbolik.

Sentimen agama yang biasa dihadapi oleh komunitas beragama biasanya bersumber dari klaim keselamatan atau kebenaran yang dikedepankan oleh para pendakwah agama yang disampaikan dihadapan para penganut agama tersebut. Agama pada umumnya memiliki watak misionaris, yaitu mewartakan ajaran agama kepada orang lain yang belum memeluk agama yang telah menjadi bagian dari komunitas agama tertentu. Hal yang sering menimbulkan perasaan tersinggung antar umat beragama adalah kebiasaan para pendakwah untuk meyakinkan umatnya terhadap doktrin ketuhanan atau teologis dengan cara membandingkannya dengan teologi agama lain yang digambarkan sebagai lembah dan sesat. Demikian pula dengan masalah etnis. Masalah ini sama potensialnya dengan sentimen agama sebagai salah satu sumber konflik keagamaan, karena salah satu yang dapat memicu adanya konflik horizontal antar masyarakat adalah adanya perbedaan etnis (Tue Mali 2017).

2.3. Stabilitas Keamanan

Keamanan merupakan faktor penting dalam berjalannya suatu tujuan berorganisasi, maupun bernegara. Konsep keamanan menjadi fokus utama dalam politik luar negeri. Namun konsep keamanan mempunyai makna berbeda untuk aktor yang berbeda. Oleh karena disebabkan konsep keamanan semakin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa. Kerjasama kawasan (khususnya kawasan Asia Tenggara) diperlukan karena merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa. Sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan diantara masyarakat sekawasan. Konsep keamanan pasca perang dingin tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik antar bangsa namun juga berpusat pada keamanan untuk rakyat, yang dulu sebagai urusan internal suatu negara seperti halnya masalah lingkungan, konflik etnis, kini dibutuhkan kerjasama dengan negara lain untuk mengatasinya.

Penyelesaian masalah penganiayaan dan radikalisasi, meskipun sudah banyak penjelasan tentang meningkatnya radikalisasi dan berujung terorisme yang disponsori negara dan nonnegara dapat meningkatkan radikalisasi dari komunitas yang dianiaya terbukti dalam studi tentang bagaimana mayoritas etnis-religius telah menganiaya minoritas, memuncak dalam masalah keamanan yang serius, seperti telah terjadi di India, Sri Langka, China, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Dalam hal ini, satu pertanyaan penting yang perlu dicatat ialah peran yang dimainkan oleh penindasan sistematis mayoritas orang Buddhis Burma terhadap Muslim Rohingya dan sejauh mana ini telah meningkatkan radikalisasi, dalam hal ini, islamisasi radikal dari orang Rohingya dan potensi tantangan keamanan yang bisa dihadapkan ini tidak hanya kepada Myanmar, tetapi juga kepada Asia maupun Asia Tenggara (Susanto 2019).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat mendeskripsikan permasalahan kemanusiaan terkait Pengaruh Konflik Rohingya Myanmar terhadap Stabilitas Keamanan Asia Tenggara. Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah dari studi pustaka dengan berdasarkan pada penelitian yang sudah dilaksanakan. Metode ini digunakan dengan melakukan sebuah kegiatan dengan mengumpulkan berbagai sumber pustaka dengan membaca dan menganalisis kemudian mengolah bahan penelitian yang sudah didapatkan.

Data penelitian didapatkan pada penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan *research* terlebih dahulukemudian menelaah isi dari jurnal yang dianggap sesuai. Teknik analisis data dalam penulisan penelitian ini adalah dengan melakukan analisis isi jurnal untuk memastikan kesesuaiannya dan analisis seperti ini digunakan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber bahan yang valid dapat dilakukan penelitian ulang sesuai dengan tahapan dan bidangnya.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Faktor Pemicu Konflik Rohingya Myanmar

Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal meledaknya konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas dan masalah entitas etnis. Perlakuan diskriminatif terhadap Etnis Rohingnya, antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda. Tidak seperti etnis lain, Etnis Rohingnya tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, melainkan sebagai pendatang ilegal. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Etnis Rohingnya, antara lain mereka tidak diberi izin usaha; diberikan pajak yang tinggi dan berlebihan, jika pajak tersebut tidak mampu untuk dibayarkan maka lahan pertanian, tambak, atau properti apapun yang mereka miliki akan disita (Setiyani and Setiyono 2020).

Akar konflik dari masalah yang ada adalah kecemburuan terhadap etnis Rohingya yang dalam beberapa dasawarsa ini terus meningkat. Hal ini menyebabkan kecurigaan dan kecemburuan pada etnis mayoritas Rakhine. Bagi mereka, keberadaan etnis Rohingya pun sangat mungkin dianggap sebagai pengganggu dan tidak memiliki hak untuk kesejahteraan yang sama, yakni sesuatu yang terus mengganggu. Keberadaan etnis Rohingya dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine yang menjadi pusat kehidupan etnis Muslim ini.

Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya, karena menganggap kelompok Muslim ini bukan bagian dari kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam Al Jazeera, 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh. Hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya konflik sampai saat ini menjadi permasalahan di Negara Myanmar bahkan di asia tenggara yang hampir semua anggota ASEAN terkena dampaknya terutama Negara-negara didekat Myanmar (Ikhsani 2019).

4.2. Stabilitas Keamanan Asia Tenggara

Negara-negara Asia Tenggara pada dasarnya membentuk sebuah organisasi yang dinamakan ASEAN dan didalamnya ada point yang mengatur tentang keamanan ketika terjadi sebuah konflik atau permasalahan yaitu salah satunya Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC). Artinya dalam kondisi adanya konflik Rohingya di Myanmar yang menjadi tantangan adalah dibidang keamanan dengan tujuan utama yaitu tetap membuat kondisi keamanan Negara-negara Asia Tenggara tetap stabil sehingga tidak mengganggu segala urusan dan kegiatan dalam bernegara dan berbangsa (Mardila 2020).

Krisis yang terjadi di Myanmar, termasuk penganiayaan, kekerasan, dan pelanggaran sistematis terhadap etnis Rohingya, dan gelombang pengungsi akibat konflik tidak hanya menjadi masalah bagi Myanmar, tetapi juga merupakan masalah bagi seluruh ASEAN. Kejahatan tersebut mengancam merusak standar Hak Asasi Manusia dan martabat warga ASEAN Karena akan mengganggu stabilitas keamanan. Konflik yang menyebabkan meledaknya arus pengungsi ini tentunya akan mengganggu keamanan dan stabilitas apabila tidak ditanggapi secara serius. Salah satu tujuan ASEAN yaitu menciptakan lingkungan yang damai dan stabil. Ini tercantum dalam piagam ASEAN poin kedua, yaitu: "Untuk memelihara perdamaian dan stabilitas regional dengan

mentaati keadilan, tata hukum dalam hubungan antara bangsa-bangsa Asia Tenggara serta berpegang teguh pada azas-azas piagam PBB” (Susanto 2019).

Komunitas keamanan ASEAN bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif, dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan / aliansi militer, maupun kebijakan luar negeri bersama. Artinya dalam upaya tetap menjaga stabilitas kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara para pemimpin bangsa dan Negara-negara anggota ASEAN mengambil kebijakan berdasarkan percepatan implementasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN promosi dan perlindungan HAM.

Negara-negara ASEAN membuat kebijakan bahwa keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik Rohingnya Myanmar berpegang teguh pada Masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma, Kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif, dan Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar.

Banyak Rohingnya ditangkap karena pihak berwenang mengawasi mereka dengan ketat. Sejumlah besar penduduk Muslim dipaksa pindah dengan alasan keamanan. Lebih dari 200.000 Rohingnya melarikan diri dari kekerasan berikutnya ke Bangladesh. Maka dari itu salah satu Negara di Asia Tenggara mengambil langkah cepat untuk bersikap dalam memeberikan keamanan untuk negaranya dengan cara Pemerintah Thailand tidak siap menghadapi masuknya para pengungsi ini dan tanggapan mereka menunjukkan kesulitan dan ketidaksiapan negara itu dalam menyeimbangkan kewajiban kemanusiaan dengan kekhawatiran atas keamanan perbatasan.

Sedangkan di Indonesia yang merupakan salah satu tempat mendarat orang-orang Rohingnya. Sebelum Jusuf Kalla memerintahkan menerima pengungsi, pihak keamanan laut Indonesia juga mendorong kapal-kapal pengungsi yang tidak terdampar di daratan Indonesia kembali ke tengah laut setelah dibantu perbekalan minum dan makanan. Menurut Kalla, Indonesia menerima pengungsi tersebut demi alasan kemanusiaan. Indonesia akan berusaha mempersatukan keluarga yang terpisah. Adapun anak-anak yang tidak memiliki keluarga lagi akan ditampung di panti asuhan dan pesantren di Indonesia. Namun, pemerintah memberlakukan syarat, Indonesia hanya menampung pengungsi selama satu tahun. Setelah itu, harus ada repatriasi ke negara asal atau diterima di negara-negara lain yang menjadi tujuan.

ASEAN memang merupakan lembaga yang paling tepat dalam penyelesaian konflik dan krisis ini karena Myanmar sendiri berada dalam wilayah Asia Tenggara dan secara langsung konflik ini memberikan dampak terhadap keamanan dan stabilitas kawasan dan terkhususnya kepada negara-negara tetangga Myanmar di kawasan ini. Tidak salah jika ASEAN sebagai organisasi regional diharapkan mampu untuk menyelesaikan krisis tersebut dalam pencapaian stabilitas keamanan karena untuk mencapai suatu negara yang stabil diperlukan suatu kawasan yang stabil (Sundari, Prayuda, and Venita Sary 2021).

4.3. Peranan Negara Asia Tenggara Dalam Penyelesaian Konflik di Myanmar

ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara telah banyak memainkan peran penting dalam mewujudkan proses demokratisasi bagi negara-negara anggotanya. Hal tersebut dapat terlihat setidaknya dalam menangani kasus di Myanmar. Rezim militer yang telah berkembang di Myanmar sejak tahun 1988 telah menimbulkan aksi protes dan menelan korban ribuan nyawa tidak berdosa. Dunia internasional dengan keras mengutuk pemerintah Myanmar dengan memberlakukan sederet sanksi untuk menekan pemerintah Myanmar.

Prinsip yang dijunjung ASEAN lebih menekankan pada pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Pada pertemuan ASEAN ke 42 di Thailand, PM Thailand menekankan bahwa harus lebih produktif daripada memberikan sanksi kepada Myanmar. Pendekatan yang dilakukan lebih menitikberatkan pada proses meyakinkan pemerintah berkuasa Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung

langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi di Myanmar. ASEAN sendiri lebih menempatkan diri sebagai forum untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi dan bukan sebagai aktor utama yang berhak melakukan tindakan kepada negara anggotanya.

Salah satu upaya ASEAN adalah menggelar *The ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC), komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu Myanmar. Pada pertemuan di Bali, AIPMC menghimbau Presiden Myanmar Thein Sein untuk melanjutkan tugasnya memajukan proses demokratisasi dan penegakan Hak Asasi Manusia di Myanmar. Myanmar harus mengambil langkah-langkah konkret dan maju menuju perundingan damai dengan kelompok-kelompok etnis yang bersenjata sebagai prasyarat untuk kemajuan demokrasi. Prinsip yang diterapkan ASEAN selama ini telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat stabilitas dan perdamaian terbaik dibandingkan kawasan negara berkembang lainnya. ASEAN selain sebagai penggerak utama pertumbuhan politik di kawasan, juga mampu menciptakan partisipasi yang aktif dan rasa saling memiliki seluruh anggota (Tue Mali 2017).

5. Kesimpulan

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN sebagai organisasi regional antara lain berperan dalam mengelola konflik, yakni konflik komunal dan sektarian yang terjadi di negara bagian Barat Rakhine, Myanmar, menjadi salah satu fokus perhatian para pemimpin Asia Tenggara. Negara-negara ASEAN membuat kebijakan bahwa keputusan yang diambil dalam menghadapi konflik Rohingnya Myanmar berpegang teguh pada Masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma, Kawasan yang kohesif, damai dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan komprehensif, dan Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar. Semua negara anggota ASEAN memberikan bantuan penuh kepada penyelesaian konflik Rohingnya tanpa membedakan SARA dengan melakukan diplomasi-diplomasi internasional.

Daftar Pustaka

- Arya Ardani, Fatma. 2015. "Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Etnis Rohingnya Dan Etnis Rakhine Di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono)." *Journal of International Relations*.
- Faurika, Fisa. 2020. "Faktor Penghambat ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Untuk Menegakkan HAM Dalam Konflik Etnis Rohingnya-Pemerintah Myanmar." *Jurnal Universitas Pertamina*.
- Ikhsani, Munadia. 2019. "Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar Di Bawah Prinsip Non-Intervensi Asean." *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*.
- Karina, Maria Elsa. 2020. "Analisa Perbandingan Kebijakan Malaysia Dan Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingnya." *Padjadjaran Journal of International Relations*.
- Mardila, Riana. 2020. "Rohingya's In Search For Security: An Introduction To Human Security Concept Through Rohingnya' Lens." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*.
- Sawal, Indah Anggraini. 2017. "Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingnya Di Myanmar Terhadap Negara-Negara ASEAN."
- Setiyani, Setiyani and Joko Setiyono. 2020. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingnya Di Myanmar." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Sundari, Rio, Rendi Prayuda, and Dian Venita Sary. 2021. "Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar." *Jurnal Niara*.
- Susanto, Normawati. 2019. "Pengaruh Konflik Pemerintah Sipil Dan Militer Myanmar Terhadap Kebijakan Myanmar Dalam Penanganan Kasus Rohingnya Tahun 2015-2019." *Journal of International Relations*.
- Tue Mali, Fransiskus X. Gian. 2017. "Peluang Asean Community Menyelesaikan Masalah Rohingnya." *Jurnal Asia Pacific Studies*.